



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, Penilaian Kinerja desa dan Pemberian insentif desa mandiri ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus;
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa;
12. Alokasi Dana Desa Insentif Desa Mandiri selanjutnya disingkat ADD IDM adalah Insentif bagi Desa Mandiri diberikan berdasarkan hasil penetapan status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status Desa Mandiri;
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
14. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa;
15. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD, aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH);
16. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

17. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa;
18. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
20. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 226,230,504,000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat ribu rupiah*).
- (2) ADD yang diterima Desa terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK); dan
 - d. Alokasi Dana Desa Insentif Desa Mandiri (ADD IDM).
- (3) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp.158,361,352,800,00 (*seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten.
- (4) Jumlah ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp.42,748,405,840,00 (*empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dari total pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dan ADD Insentif Desa Mandiri dikalikan dengan nilai BDx.
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp.18,320,745,360,00 (*delapan belas miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) dari jumlah pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dan Insentif Desa Mandiri dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing Desa.
- (6) Jumlah ADD IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp. 6,800,000,000,00 (*enam miliar delapan ratus juta rupiah*) yang diberikan kepada setiap desa dengan besaran yang sama sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta*) dengan status Desa Mandiri.

- (7) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
- 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$
- Keterangan:
- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten
- BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.
- JP = Jumlah Penduduk Desa.
- JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.
- LW = Luas Wilayah Desa.
- IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (9) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :
 $BDxJP = 50\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$
 - Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:
 $BDxJPM = 30\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$
 - Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :
 $BDxLW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$
 - Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:
 $BDxIKG = 10\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$
- (10) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

- b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

- c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

- d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

- (11) Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa ini adalah dalam bentuk Indeks kinerja desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks pada setiap aspek yaitu penjumlahan dari Indeks tata kelola pemerintahan desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks pada aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formulai sebagai berikut:

$$\text{IKD} = \beta \times \text{ITKPD} + \beta \times \text{IKPD} + \beta \times \text{IPLH}$$

Dimana:

IKD : Indeks Kinerja Desa

β : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 35% (tiga puluh lima persen) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk IPLH

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

- b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini. Terdapat 12 indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{ITKPD} = & \beta \times \text{ITKPD 1} + \beta \times \text{ITKPD 2} + \beta \times \text{ITKPD 3} + \beta \times \text{ITKPD 4} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 5} + \beta \times \text{ITKPD 6} + \beta \times \text{ITKPD 7} + \beta \times \text{ITKPD 8} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 9} + \beta \times \text{ITKPD 10} + \beta \times \text{ITKPD 11} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 12} \end{aligned}$$

Dimana:

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 1
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 2
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 3
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 4
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 5
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 6
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 7
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 8
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 9
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 10
 - Bobot 5% (Lima perseratus) untuk ITKPD 11
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 12
- ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
- ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Pembinaan Kelembagaan Desa
- ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Sistem Layanan Informasi Publik
- ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Inovasi Layanan Publik Desa
- ITKPD 5 : Indeks indikator 5: Transparansi Keuangan Desa
- ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun Berjalan
- ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
- ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
- ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD

ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD
Dalam Menjalankan Fungsi

- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 9 (sembilan) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKPD} = & \beta \times \text{IKPD 1} + \beta \times \text{IKPD 2} + \beta \times \text{IKPD 3} + \beta \times \text{IKPD 4} \\
 & + \beta \times \text{IKPD 5} + \beta \times \text{IKPD 6} + \beta \times \text{IKPD 7} \\
 & + \beta \times \text{IKPD 8} + \beta \times \text{IKPD 9}
 \end{aligned}$$

Dimana:

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :

- Bobot 15% (Lima Belas perseratus) untuk IKPD 1
- Bobot 15% (Lima Belas perseratus) untuk IKPD 2
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 3
- Bobot 10% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 4
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 5
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 6
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 7
- Bobot 10% (sepuluh perseratur) untuk IKPD 8
- Bobot 10% (sepuluh perseratus) untuk IKPD 9

IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa

IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa

IKPD 3 : Indeks indikator 3: Program Pemberdayaan Masyarakat

IKPD 4 : Indeks indikator 4: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa

IKPD 5 : Indeks indikator 5: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa

IKPD 6 : Indeks indikator 6: Ketersediaan sarana dan prasarana rumah baca desa

IKPD 7 : Indeks indikator 7: Peringkat/Klasifikasi BUMDesa

IKPD 8 : Indeks indikator 8: Peningkatan Jalan Desa kondisi baik dari dana bermasa

IKPD 9 : Indeks indikator 9: Inovasi kegiatan posyantek dengan pendekatan Teknologi Tepat Guna

- Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator kerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4 + \beta \times IPLH 5$$

Dimana:

IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :

- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 1
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 2
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 3
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 4
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 5

IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup

IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup

IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDesa

IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup

IPLH 5 : Indeks indikator 5: Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa

- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{Desa i} - \text{Nilai}_{Desa min})}{\text{Nilai}_{Desa max} - \text{Nilai}_{Desa min}}$$

Pasal 3

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung berdasarkan Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD), Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dan Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH).

Pasal 5

ADDIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) diberikan berdasarkan hasil penetapan status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status Desa Mandiri.

Pasal 6

- (1) Penetapan hasil Indeks Kinerja Desa (IKD) setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II, paling cepat bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. tahap IV, paling cepat bulan Oktober sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
- (2) besaran penyaluran ADD tahap IV sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d untuk realisasi besaran penyaluran berdasarkan penerimaan dana transfer yang diterima RKUD dari RKUN pada tahun berjalan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 8

Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

ADD digunakan :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- c. dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 3

Lampiran I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 Nomor : 3 Tahun 2025
 Tanggal : 10 Januari 2025

PENETAPAN HASIL PENILAIAN INDEK KINERJA DESA (IKD)
 KABUPATEN BENGKALIS 2025

No	Kecamatan	Desa	Indeks TKPD	Indeks KPD	Indeks PLH	IKD
1	BATHIN SOLAPAN	SEBANGAR	0.324	0.169	0.247	0.740
2	RUPAT	PARIT KEBUMEN	0.318	0.200	0.200	0.718
3	BUKIT BATU	SUNGAI SELARI	0.333	0.211	0.165	0.709
4	BENGKALIS	PEMATANG DUKU TIMUR	0.289	0.195	0.225	0.709
5	BUKIT BATU	PANGKALAN JAMBI	0.295	0.183	0.230	0.707
6	RUPAT UTARA	TANJUNG MEDANG	0.286	0.187	0.232	0.705
7	BENGKALIS	TAMERAN	0.257	0.187	0.247	0.690
8	RUPAT UTARA	SUKA DAMAI	0.289	0.185	0.212	0.685
9	SIK KECIL	SUNGAI SIPUT	0.312	0.207	0.166	0.685
10	RUPAT	SRI TANJUNG	0.280	0.188	0.216	0.684
11	BANTAN	MENTAYAN	0.303	0.155	0.224	0.682
12	RUPAT	MAKERUH	0.263	0.182	0.233	0.678
13	BANDAR LAKSAMANA	SEPAHAT	0.315	0.200	0.161	0.676
14	BENGKALIS	PENEHAL	0.289	0.168	0.219	0.676
15	RUPAT	DUNGUN BARU	0.300	0.172	0.201	0.674
16	RUPAT	SUNGAI CINGAM	0.300	0.195	0.175	0.670
17	BENGKALIS	SUNGAI BATANG	0.280	0.181	0.208	0.670
18	BANTAN	BERANCAH	0.338	0.151	0.178	0.667
19	BUKIT BATU	BURUK BAKUL	0.295	0.178	0.194	0.666
20	RUPAT	PANCUR JAYA	0.268	0.197	0.198	0.664
21	PINGGIR	PANGKALAN LIBUT	0.306	0.179	0.174	0.659
22	BANTAN	TELUK PAPAL	0.280	0.212	0.165	0.658
23	BUKIT BATU	SEJANGAT	0.309	0.194	0.154	0.657
24	BATHIN SOLAPAN	BALAI MAKAM	0.245	0.162	0.241	0.648
25	RUPAT	TELUK LECAH	0.263	0.170	0.214	0.647
26	RUPAT UTARA	TELUK RHU	0.327	0.148	0.172	0.647
27	BUKIT BATU	BATANG DUKU	0.295	0.177	0.172	0.644
28	BANTAN	MUNTAI BARAT	0.306	0.129	0.205	0.640
29	RUPAT UTARA	PUTERI SEMBILAN	0.303	0.143	0.192	0.638
30	BANTAN	PASIRAN	0.327	0.174	0.135	0.635
31	SIK KECIL	KOTO RAJA	0.274	0.172	0.189	0.635
32	BENGKALIS	WONOSARI	0.265	0.201	0.167	0.634
33	BANTAN	KEMBUNG BARU	0.338	0.158	0.137	0.633
34	SIK KECIL	TANJUNG BELIT	0.251	0.173	0.208	0.632
35	BANDAR LAKSAMANA	TENGGAYUN	0.283	0.169	0.178	0.630
36	SIK KECIL	TANJUNG DAMAI	0.283	0.166	0.180	0.629
37	BATHIN SOLAPAN	TAMBUSAI BATANG DUI	0.286	0.151	0.188	0.625
38	RUPAT UTARA	TITI AKAR	0.216	0.175	0.233	0.624
39	BENGKALIS	AIR PUTIH	0.251	0.177	0.193	0.620
40	BANTAN	KEMBUNG LUAR	0.268	0.163	0.188	0.619
41	BUKIT BATU	PAKNING ASAL	0.303	0.172	0.143	0.618
42	BANTAN	TELUK LANCAR	0.260	0.164	0.192	0.616
43	BATHIN SOLAPAN	SIMPANG PADANG	0.263	0.160	0.189	0.612
44	BANTAN	RESAM LAPIS	0.306	0.198	0.097	0.602

45	MANDAU	HARAPAN BARU	0.257	0.146	0.193	0.596
46	MANDAU	BATHIN BETUAH	0.306	0.168	0.120	0.594
47	BANDAR LAKSAMANA	TANJUNG LEBAN	0.251	0.151	0.190	0.591
48	BANTAN	MUNTAI	0.300	0.173	0.118	0.591
49	BATHIN SOLAPAN	BONCAH MAHANG	0.271	0.154	0.164	0.589
50	BENGGALIS	KELEMANTAN BARAT	0.225	0.170	0.191	0.585
51	BUKIT BATU	DOMPAS	0.263	0.178	0.143	0.583
52	BENGGALIS	PANGKALAN BATANG BARAT	0.292	0.166	0.124	0.582
53	RUPAT UTARA	TANJUNG PUNAK	0.298	0.165	0.117	0.580
54	BANDAR LAKSAMANA	BUKIT KERIKIL	0.254	0.197	0.126	0.576
55	BENGGALIS	SIMPANG AYAM	0.283	0.184	0.109	0.576
56	BANDAR LAKSAMANA	API - API	0.222	0.191	0.161	0.574
57	BANTAN	PAMBANG BARU	0.251	0.158	0.164	0.573
58	SIK KECIL	TANJUNG DATUK	0.230	0.169	0.170	0.570
59	SIK KECIL	SUMBER JAYA	0.245	0.198	0.123	0.566
60	BENGGALIS	PANGKALAN BATANG	0.271	0.172	0.120	0.564
61	BANTAN	BANTAN TENGAH	0.318	0.166	0.075	0.559
62	BENGGALIS	SUNGAI ALAM	0.280	0.145	0.130	0.555
63	RUPAT	SUKARJO MESIM	0.263	0.161	0.132	0.555
64	SIK KECIL	SADAR JAYA	0.268	0.188	0.098	0.555
65	BANTAN	JANGKANG	0.228	0.199	0.126	0.553
66	BATHIN SOLAPAN	BULUH MANIS	0.283	0.149	0.120	0.552
67	SIK KECIL	LUBUK GARAM	0.303	0.121	0.122	0.547
68	PINGGIR	SUNGAI MERANTI	0.274	0.155	0.115	0.544
69	BENGGALIS	TELUK LATAK	0.236	0.208	0.097	0.542
70	BANDAR LAKSAMANA	PARIT I API-API	0.242	0.089	0.210	0.542
71	BATHIN SOLAPAN	PETANI	0.175	0.151	0.215	0.541
72	BANTAN	SELAT BARU	0.260	0.160	0.118	0.537
73	SIK KECIL	BANDAR JAYA	0.257	0.173	0.105	0.534
74	BANTAN	DELUK	0.280	0.140	0.112	0.532
75	BENGGALIS	KELAPAPATI	0.242	0.187	0.103	0.532
76	SIK KECIL	SUNGAI NIBUNG	0.274	0.157	0.100	0.531
77	BENGGALIS	SEKODI	0.248	0.114	0.165	0.527
78	BATHIN SOLAPAN	AIR KULIM	0.210	0.128	0.186	0.524
79	RUPAT	HUTAN PANJANG	0.260	0.161	0.104	0.524
80	BENGGALIS	PRAPAT TUNGGAL	0.228	0.167	0.129	0.523
81	BENGGALIS	MESKOM	0.228	0.175	0.120	0.522
82	BENGGALIS	PENAMPI	0.263	0.149	0.107	0.518
83	BATHIN SOLAPAN	PEMATANG OBO	0.236	0.147	0.132	0.515
84	RUPAT UTARA	HUTAN AYU	0.213	0.149	0.150	0.512
85	BANTAN	SUKA MAJU	0.201	0.142	0.169	0.512
86	BATHIN SOLAPAN	PAMESI	0.230	0.152	0.130	0.512
87	SIK KECIL	LUBUK MUDA	0.248	0.164	0.098	0.510
88	PINGGIR	MUARA BASUNG	0.263	0.118	0.130	0.510
89	BUKIT BATU	BUKIT BATU	0.265	0.123	0.119	0.507
90	BENGGALIS	KETAM PUTIH	0.245	0.144	0.117	0.506
91	BANDAR LAKSAMANA	TEMIANG	0.245	0.141	0.119	0.505
92	SIK KECIL	LIANG BANIR	0.251	0.134	0.117	0.502
93	SIK KECIL	SUNGAI LINAU	0.242	0.179	0.078	0.500
94	BANTAN	TELUK PAMBANG	0.280	0.149	0.070	0.499

95	BATHIN SOLAPAN	BUMBUNG	0.242	0.089	0.165	0.497
96	BANTAN	BANTAN SARI	0.277	0.119	0.099	0.495
97	BENGKALIS	DAMAI	0.219	0.154	0.122	0.494
98	BENGKALIS	KELEMANTAN	0.228	0.152	0.108	0.487
99	TALANG MUANDAU	TASIK TEBING SERAI	0.213	0.147	0.123	0.483
100	SIK KECIL	MUARA DUA	0.230	0.180	0.070	0.481
101	TALANG MUANDAU	BERINGIN	0.228	0.128	0.122	0.477
102	SIK KECIL	LANGKAT	0.216	0.209	0.049	0.474
103	TALANG MUANDAU	SERAI WANGI	0.198	0.158	0.117	0.473
104	PINGGIR	BALAI PUNGUT	0.260	0.180	0.028	0.468
105	SIK KECIL	SEPOTONG	0.216	0.202	0.049	0.466
106	TALANG MUANDAU	TASIK SERAI TIMUR	0.213	0.112	0.130	0.455
107	PINGGIR	SEMUNAI	0.207	0.127	0.120	0.454
108	SIK KECIL	LUBUK GAUNG	0.207	0.130	0.117	0.454
109	BENGKALIS	SENGGORO	0.198	0.158	0.096	0.452
110	BANTAN	BANTAN TUA	0.283	0.120	0.047	0.450
111	RUPAT	PANGKALAN NYIRIH	0.175	0.154	0.120	0.449
112	PINGGIR	BULUH APO	0.195	0.125	0.122	0.443
113	PINGGIR	TENGGANAU	0.210	0.130	0.096	0.436
114	BENGKALIS	SENDERAK	0.251	0.149	0.034	0.435
115	BANTAN	PAMBANG PESISIR	0.242	0.169	0.023	0.434
116	BENGKALIS	PEDEKIK	0.198	0.186	0.049	0.433
117	BATHIN SOLAPAN	BATHIN SOBANGA	0.216	0.094	0.122	0.432
118	TALANG MUANDAU	KUALA PENASO	0.280	0.107	0.027	0.414
119	TALANG MUANDAU	MELIBUR	0.204	0.088	0.118	0.411
120	PINGGIR	PINGGIR	0.172	0.106	0.118	0.397
121	BENGKALIS	SEBAUK	0.193	0.141	0.061	0.394
122	BANTAN	ULU PULAU	0.242	0.126	0.023	0.392
123	BENGKALIS	PALKUN	0.210	0.050	0.121	0.382
124	BANTAN	BANTAN TIMUR	0.175	0.150	0.048	0.373
125	RUPAT	PANGKALAN PINANG	0.242	0.081	0.049	0.372
126	BUKIT BATU	SUKAJADI	0.216	0.099	0.048	0.363
127	BENGKALIS	PEMATANG DUKU	0.163	0.139	0.047	0.350
128	TALANG MUANDAU	KOTO PAIT BERINGIN	0.044	0.166	0.121	0.331
129	BENGKALIS	KELEBUK	0.187	0.076	0.023	0.286
130	BANTAN	BANTAN AIR	0.172	0.079	0.023	0.275
131	BENGKALIS	KUALA ALAM	0.111	0.109	0.023	0.243
132	RUPAT	DARUL AMAN	0.102	0.103	0.024	0.229
133	TALANG MUANDAU	TASIK SERAI	0.044	0.087	0.093	0.224
134	TALANG MUANDAU	TASIK SERAI BARAT	0.085	0.089	0.047	0.221
135	RUPAT UTARA	KADUR	0.123	0.046	0.023	0.192
136	BATHIN SOLAPAN	KESUMBO AMPAI	0.044	0.043	0.023	0.110

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Lampiran II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 Nomor : 3 Tahun 2025
 Tanggal : 10 Januari 2025

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ADDK	ADD IDM	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
I	KECAMATAN BENGKALIS					
1	KELAPAPATI	1,164,421,712	592,550,702	133,985,941	50,000,000	1,940,958,355
2	PEDEKIK	1,164,421,712	328,397,319	109,082,940	50,000,000	1,651,901,971
3	PANGKALAN BATANG	1,164,421,712	320,639,684	141,896,150	50,000,000	1,676,957,546
4	SEBAUK	1,164,421,712	191,763,577	99,134,097	50,000,000	1,505,319,385
5	TELUK LATAK	1,164,421,712	260,192,033	136,378,115	50,000,000	1,610,991,860
6	MESKÖM	1,164,421,712	241,414,929	131,475,250	50,000,000	1,587,311,890
7	SENGGORO	1,164,421,712	628,096,661	113,797,813	50,000,000	1,956,316,186
8	AIR PUTIH	1,164,421,712	414,715,650	156,142,673	50,000,000	1,785,280,035
9	SUNGAI ALAM	1,164,421,712	316,319,504	139,776,345	50,000,000	1,670,517,561
10	PENAMPI	1,164,421,712	216,824,011	130,383,567	50,000,000	1,561,629,290
11	TAMERAN	1,164,421,712	227,793,942	173,791,950	50,000,000	1,616,007,604
12	PENEHAL	1,164,421,712	297,700,976	170,092,029	50,000,000	1,682,214,717
13	PEMATANG DUKU	1,164,421,712	340,748,386	88,041,195	50,000,000	1,643,211,293
14	KETAM PUTIH	1,164,421,712	259,305,159	127,346,407	50,000,000	1,601,073,278
15	KELEMANTAN	1,164,421,712	199,136,226	122,634,124	50,000,000	1,536,192,061
16	SEKODI	1,164,421,712	266,394,049	132,561,944	50,000,000	1,613,377,705
17	WONOSARI	1,164,421,712	651,470,817	159,525,263	50,000,000	2,025,417,792
18	KUALA ALAM	1,164,421,712	280,106,956	61,300,628	50,000,000	1,555,829,296
19	KELEBUK	1,164,421,712	136,771,668	72,087,125	50,000,000	1,423,280,504
20	PALKUN	1,164,421,712	169,619,618	96,057,873	50,000,000	1,480,099,203
21	SUNGAI BATANG	1,164,421,712	259,213,970	168,654,347	50,000,000	1,642,290,028
22	PRAPAT TUNGGAL	1,164,421,712	193,170,802	131,787,473	50,000,000	1,539,379,987
23	SIMPANG AYAM	1,164,421,712	173,989,072	144,978,579	50,000,000	1,533,389,363
24	SENDERAK	1,164,421,712	213,532,511	109,394,615	50,000,000	1,537,348,837
25	KELEMANTAN BARAT	1,164,421,712	209,591,329	147,262,860	50,000,000	1,571,275,900
26	DAMAI	1,164,421,712	182,423,569	124,406,965	50,000,000	1,521,252,245
27	PANGKALAN BATANG BARAT	1,164,421,712	238,387,284	146,538,202	50,000,000	1,599,347,198
28	PEMATANG DUKU TIMUR	1,164,421,712	211,429,375	178,431,846	50,000,000	1,604,282,933
	J U M L A H	32,603,807,929	8,021,699,780	3,646,946,315	1,400,000,000	45,672,454,024

II	KECAMATAN BANTAN					
1	BANTAN TENGAH	1,164,421,712	323,324,013	140,664,717	50,000,000	1,678,410,442
2	BANTAN AIR	1,164,421,712	187,812,008	69,183,824	50,000,000	1,471,417,544
3	BANTAN TUA	1,164,421,712	344,768,053	113,285,846	50,000,000	1,672,475,611
4	TELUK PAMBANG	1,164,421,712	134,980,577	125,749,003	50,000,000	1,475,151,291
5	SELAT BARU	1,164,421,712	384,925,688	135,280,426	50,000,000	1,734,627,825
6	TELUK LANCAR	1,164,421,712	292,834,433	155,107,544	50,000,000	1,662,363,689
7	KEMBUNG LUAR	1,164,421,712	252,485,823	155,852,215	50,000,000	1,622,759,750
8	JANGKANG	1,164,421,712	284,257,366	139,132,181	50,000,000	1,637,811,259
9	MUNTAI	1,164,421,712	264,781,110	148,770,553	50,000,000	1,627,973,374
10	RESAM LAPIS	1,164,421,712	158,151,145	151,462,606	50,000,000	1,524,035,462
11	BERANCAH	1,164,421,712	313,747,961	167,984,247	50,000,000	1,696,153,920
12	ULU PULAU	1,164,421,712	205,448,756	98,632,269	50,000,000	1,518,502,737
13	MENTAYAN	1,164,421,712	163,358,356	171,736,333	50,000,000	1,549,516,401
14	PAMBANG PESISIR	1,164,421,712	199,367,721	109,319,797	50,000,000	1,523,109,229
15	SUKA MAJU	1,164,421,712	276,843,146	128,922,746	50,000,000	1,620,187,604
16	PAMBANG BARU	1,164,421,712	204,829,982	144,162,167	50,000,000	1,563,413,861
17	KEMBUNG BARU	1,164,421,712	272,809,785	159,443,899	50,000,000	1,646,675,396
18	PASIRAN	1,164,421,712	174,581,778	159,947,449	50,000,000	1,548,950,939
19	BANTAN SARI	1,164,421,712	157,145,677	124,699,052	50,000,000	1,496,266,441
20	BANTAN TIMUR	1,164,421,712	233,225,285	93,881,957	50,000,000	1,541,528,954
21	TELUK PAPAL	1,164,421,712	262,191,336	165,630,111	50,000,000	1,642,243,160
22	MUNTAI BARAT	1,164,421,712	169,537,509	161,169,444	50,000,000	1,545,128,665
23	DELUK	1,164,421,712	188,012,702	134,008,260	50,000,000	1,536,442,674
	J U M L A H	26,781,699,371	5,449,420,210	3,154,026,645	1,150,000,000	36,535,146,226

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ADDK	ADD IDM	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
III.	KECAMATAN BUKIT BATU					
1	SEJANGAT	1,164,421,712	238,067,031	165,284,254	50,000,000	1,617,772,997
2	DOMPAS	1,164,421,712	201,242,833	146,807,161	50,000,000	1,562,471,706
3	PANGKALAN JAMBI	1,164,421,712	170,164,975	177,983,414	50,000,000	1,562,570,101
4	SUNGAI SELARI	1,164,421,712	248,697,901	178,544,351	50,000,000	1,641,663,964
5	BURUK BAKUL	1,164,421,712	173,887,173	167,699,450	50,000,000	1,556,008,335
6	BUKIT BATU	1,164,421,712	142,333,231	127,606,506	50,000,000	1,484,361,449
7	SUKAJADI	1,164,421,712	237,349,851	91,427,695	50,000,000	1,543,199,258
8	BATANG DUKU	1,164,421,712	297,025,802	162,032,284	50,000,000	1,673,479,798

9	PAKNING ASAL	1,164,421,712	389,655,990	155,585,096	50,000,000	1,759,662,798
	J U M L A H	10,479,795,406	2,098,424,787	1,372,970,213	450,000,000	14,401,190,406
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
1	PARIT I API-API	1,164,421,712	109,200,400	136,341,624	50,000,000	1,459,963,736
2	TEMIANG	1,164,421,712	188,923,948	127,110,683	50,000,000	1,530,456,342
3	API - API	1,164,421,712	184,073,510	144,611,846	50,000,000	1,543,107,068
4	TENGGAYUN	1,164,421,712	235,604,591	158,685,019	50,000,000	1,608,711,322
5	SEPAHAT	1,164,421,712	235,297,949	170,260,705	50,000,000	1,619,980,366
6	BUKIT KERIKIL	1,164,421,712	565,441,247	145,017,946	50,000,000	1,924,880,905
7	TANJUNG LEBAN	1,164,421,712	250,654,777	148,848,920	50,000,000	1,613,925,408
	J U M L A H	8,150,951,982	1,769,196,422	1,030,876,742	350,000,000	11,301,025,147
V	KECAMATAN MANDAU					
1	BATHIN BETUAH	1,164,421,712	340,589,301	149,491,183	50,000,000	1,704,502,195
2	HARAPAN BARU	1,164,421,712	347,743,675	150,137,432	50,000,000	1,712,302,818
	J U M L A H	2,328,843,424	688,332,976	299,628,614	100,000,000	3,416,805,014

VI	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1	BALAI MAKAM	1,164,421,712	755,525,898	163,207,469	50,000,000	2,133,155,079
2	PETANI	1,164,421,712	739,344,583	136,144,862	50,000,000	2,089,911,157
3	SEBANGAR	1,164,421,712	705,318,601	186,250,896	50,000,000	2,105,991,209
4	BUMBUNG	1,164,421,712	737,954,221	125,044,239	50,000,000	2,077,420,172
5	KESUMBO AMPAI	1,164,421,712	394,915,446	27,596,145	50,000,000	1,636,933,303
6	TAMBUSAI BATANG DUI	1,164,421,712	641,449,765	157,428,587	50,000,000	2,013,300,064
7	SIMPANG PADANG	1,164,421,712	988,888,490	153,994,428	50,000,000	2,357,304,630
8	PEMATANG OBO	1,164,421,712	519,444,435	129,705,963	50,000,000	1,863,572,110
9	AIR KULIM	1,164,421,712	595,538,550	132,021,264	50,000,000	1,941,981,526
10	BULUH MANIS	1,164,421,712	536,173,382	138,920,799	50,000,000	1,889,515,892
11	BONCAH MAHANG	1,164,421,712	1,095,052,888	148,287,554	50,000,000	2,457,762,154
12	PAMESI	1,164,421,712	313,832,784	128,852,851	50,000,000	1,657,107,347
13	BATHIN SOBANGA	1,164,421,712	400,398,103	108,760,237	50,000,000	1,723,580,051
	J U M L A H	15,137,482,253	8,423,837,146	1,736,215,295	650,000,000	25,947,534,694
VII	KECAMATAN RUPAT					
1	SUNGAI CINGAM	1,164,421,712	326,593,689	168,753,219	50,000,000	1,709,768,620
2	TELUK LECAH	1,164,421,712	322,294,886	162,850,339	50,000,000	1,699,566,937
3	MAKERUH	1,164,421,712	319,610,049	170,760,666	50,000,000	1,704,792,426

4	HUTAN PANJANG	1,164,421,712	285,909,320	131,863,628	50,000,000	1,632,194,660
5	PANGKALAN NYIRIH	1,164,421,712	331,569,753	113,123,653	50,000,000	1,659,115,118
6	SUKARJO MESIM	1,164,421,712	303,142,578	139,673,626	50,000,000	1,657,237,916
7	DARUL AMAN	1,164,421,712	304,540,218	57,751,845	50,000,000	1,576,713,776
8	PARIT KEBUMEN	1,164,421,712	218,470,393	180,801,523	50,000,000	1,613,693,628
9	SRI TANJUNG	1,164,421,712	258,753,685	172,260,755	50,000,000	1,645,436,151
10	PANCUR JAYA	1,164,421,712	207,596,233	167,224,996	50,000,000	1,589,242,941
11	PANGKALAN PINANG	1,164,421,712	156,003,006	93,719,751	50,000,000	1,464,144,469
12	DUNGUN BARU	1,164,421,712	203,034,684	169,576,156	50,000,000	1,587,032,552
	J U M L A H	13,973,060,541	3,237,518,493	1,728,360,159	600,000,000	19,538,939,193

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ADDK	ADD IDM	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (4) + (5) + (6)
VIII	KECAMATAN RUPAT UTARA					
1	TANJUNG MEDANG	1,164,421,712	318,779,934	177,558,823	50,000,000	1,710,760,469
2	TELUK RHU	1,164,421,712	350,368,321	162,849,110	50,000,000	1,727,639,143
3	TANJUNG PUNAK	1,164,421,712	191,941,472	145,924,208	50,000,000	1,552,287,392
4	KADUR	1,164,421,712	274,800,165	48,397,887	50,000,000	1,537,619,763
5	TITI AKAR	1,164,421,712	564,289,139	157,125,302	50,000,000	1,935,836,153
6	HUTAN AYU	1,164,421,712	184,740,967	128,958,710	50,000,000	1,528,121,388
7	SUKA DAMAI	1,164,421,712	159,590,739	172,539,493	50,000,000	1,546,551,943
8	PUTERI SEMBILAN	1,164,421,712	250,250,711	160,743,663	50,000,000	1,625,416,086
	J U M L A H	9,315,373,694	2,294,761,448	1,154,097,195	400,000,000	13,164,232,337
IX	KECAMATAN SIAK KECIL					
1	LUBUK MUDA	1,164,421,712	280,147,589	128,414,549	50,000,000	1,622,983,850
2	TANJUNG BELIT	1,164,421,712	254,441,691	159,074,949	50,000,000	1,627,938,352
3	SUNGAI SIPUT	1,164,421,712	132,774,561	172,459,065	50,000,000	1,519,655,339
4	SEPOTONG	1,164,421,712	142,180,399	117,445,147	50,000,000	1,474,047,258
5	LUBUK GAUNG	1,164,421,712	286,844,718	114,280,245	50,000,000	1,615,546,675
6	LANGKAT	1,164,421,712	203,629,384	119,232,418	50,000,000	1,537,283,513
7	SADAR JAYA	1,164,421,712	229,722,585	139,615,002	50,000,000	1,583,759,299
8	SUNGAI LINAU	1,164,421,712	151,097,516	125,861,114	50,000,000	1,491,380,342
9	BANDAR JAYA	1,164,421,712	299,470,774	134,483,705	50,000,000	1,648,376,191
10	MUARA DUA	1,164,421,712	217,931,328	121,157,365	50,000,000	1,553,510,405
11	TANJUNG DAMAI	1,164,421,712	169,747,833	158,318,927	50,000,000	1,542,488,472
12	SUMBER JAYA	1,164,421,712	169,466,619	142,523,785	50,000,000	1,526,412,116

13	LUBUK GARAM	1,164,421,712	237,609,440	137,598,288	50,000,000	1,589,629,440
14	LIANG BANIR	1,164,421,712	120,644,652	126,462,455	50,000,000	1,461,528,819
15	TANJUNG DATUK	1,164,421,712	114,489,119	143,471,713	50,000,000	1,472,382,544
16	KOTO RAJA	1,164,421,712	183,244,095	159,941,735	50,000,000	1,557,607,542
17	SUNGAI NIBUNG	1,164,421,712	238,701,040	133,630,218	50,000,000	1,586,752,970
	J U M L A H	19,795,169,100	3,432,143,345	2,333,970,680	850,000,000	26,411,283,124
X	KECAMATAN PINGGIR					
1	BALAI PUNGUT	1,164,421,712	346,276,974	117,866,780	50,000,000	1,678,565,465
2	MUARA BASUNG	1,164,421,712	691,214,777	128,384,169	50,000,000	2,034,020,657
3	PINGGIR	1,164,421,712	699,735,796	99,864,407	50,000,000	2,014,021,915
4	SEMUNAI	1,164,421,712	736,172,912	114,345,656	50,000,000	2,064,940,280
5	TENGGANAU	1,164,421,712	696,538,636	109,890,599	50,000,000	2,020,850,947
6	SUNGAI MERANTI	1,164,421,712	486,287,188	137,001,296	50,000,000	1,837,710,196
7	PANGKALAN LIBUT	1,164,421,712	277,365,784	166,017,324	50,000,000	1,657,804,819
8	BULUH APO	1,164,421,712	346,099,876	111,553,839	50,000,000	1,672,075,427
	J U M L A H	9,315,373,694	4,279,691,943	984,924,068	400,000,000	14,979,989,705
XI	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1	TASIK TEBING SERAI	1,164,421,712	247,522,663	121,643,740	50,000,000	1,583,588,115
2	TASIK SERAI BARAT	1,164,421,712	670,982,797	55,537,009	50,000,000	1,940,941,518
3	KUALA PENASO	1,164,421,712	182,900,442	104,227,946	50,000,000	1,501,550,100
4	BERINGIN	1,164,421,712	300,170,217	120,185,878	50,000,000	1,634,777,806
5	KOTO PAIT BERINGIN	1,164,421,712	325,656,482	83,376,298	50,000,000	1,623,454,491
6	MELIBUR	1,164,421,712	195,562,871	103,463,796	50,000,000	1,513,448,378
7	TASIK SERAI TIMUR	1,164,421,712	360,820,959	114,643,122	50,000,000	1,689,885,793
8	SERAI WANGI	1,164,421,712	239,593,184	119,174,575	50,000,000	1,573,189,472
9	TASIK SERAI	1,164,421,712	530,169,675	56,477,070	50,000,000	1,801,068,457
	J U M L A H	10,479,795,406	3,053,379,290	8,787,294,341	450,000,000	14,861,904,130
	TOTAL	158,361,352,800	42,748,405,840	18,320,745,360	6,800,000,000	226,230,504,000

BUPATI BENGKALIS,


KASMARNI